



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ASLAMIYAH
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN TATA USAHA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
3. NHK : 925824

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 811.770.000

1. Tanah Seluas 287 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, Rp. 146.800.000
2. Tanah Seluas 258 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI
, Rp. 86.430.000
3. Tanah Seluas 324 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, Rp. 108.540.000
4. Tanah Seluas 107 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, Rp. 160.000.000
5. Tanah Seluas 250 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, Rp. 150.000.000
6. Tanah Seluas 160 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, Rp. 160.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 163.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU XENIA Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
120.000.000
2. MOTOR, HONDA SPACY Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
7.000.000
3. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.
36.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.900.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 31.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.007.670.000

III. HUTANG Rp. 10.200.000



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 997.470.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.